

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Seperti halnya dalam partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, baik secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*Publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dengan menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya (Budiarjo, 2008: 367).

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam (Budiarjo: 2008: 368) mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Sebagai bentuk partisipasi politik di negara demokrasi, dengan keikut andilan masyarakat dalam bidang politik, seperti ikut berpartisipasi dalam partai politik.

Partai politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik merupakan wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam negara demokrasi, dengan disahkannya Undang-Undang No.31 tahun 2002 tentang partai politik dan Undang-Undang No.12 tahun 2003 pemilihan umum dapat memperluas partisipasi politik. Salah satu cara memperluas partisipasi politik adalah melalui partai politik. Partai politik merupakan bentuk wadah organisasi, yang dapat

menyatukan pemikiran orang-orang yang mempunyai pemikiran dan orientasi yang sama sehingga bisa dikonsolidasikan.

Carl J. Fredich dalam (Budiardjo, 2008: 397) mengatakan bahwa “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan secara idiil dan materiil”.

Perempuan di Indonesia sudah banyak yang berkiprah di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pada aspek politik. Perempuan sudah banyak yang terlibat dalam perpolitikan ini. Misalnya, peran kaum perempuan pada masa kemerdekaan sudah ada Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 5 dan satu-satunya presiden perempuan di Indonesia. Serta pejabat menteri di pemerintahan saat ini sudah mulai banyak di duduki oleh perempuan, seperti menteri Badan Usaha Milik Negara; Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Puan Maharani, Menteri Kesehatan; Nila F Moeleok, Menteri Sosial; Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Yohana Yombise, Menteri Luar Negeri; Retno LP Marsudi dan Menteri Kelautan dan Perikanan; Susi Pujdiastuti. Kedelapan perempuan ini berada diantara 34 menteri lainnya yang ada dalam pemerintahan saat ini. Dalam dunia politik, peranan perempuan menunjukkan fenomena menarik dikatakan demikian karena perempuan tidak hanya memerankan politik secara tradisional (domestik) sebagai agen sosialisasi politik bagi anak-anaknya saja, akan tetapi sudah mulai aktif memperjuangkan kepentingan umum melalui lembaga politik atau partai politik.

Pada era modern ini sudah banyak gerakan perempuan yang menghendaki perempuan untuk ikut andil dalam pembangunan seperti apa yang di lakukan kaum laki-laki, keterlibatan perempuan yang semula hanya pada sumur, kasur, dan dapur sekarang harus mampu memperjuangkan hak-haknya. Seperti yang kita dengar dari masyarakat terdahulu bahwa seorang perempuan tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun tidak salah jika seorang

perempuan memiliki andil atau ikut berpartisipasi dalam partai politik dengan didukung oleh adanya kemampuan di bidang politik.

Pengakuan terhadap keterlibatan perempuan disektor publik bukan hanya sebuah jargon, akan tetapi sudah merupakan ideologi yang memberikan ruang gerak yang luas bagi kaum perempuan, fenomena ini telah memberikan kondisi riil bagi perempuan untuk mengimplementasikan potensi diri dan sekaligus mengaktualisasikan peran gandanya. Salah satu wujud kemampuan perempuan dalam mengaktualisasikan perannya adalah dengan berpartisipasi dan ikut serta dalam keterlibatan partai politik.

Persoalan partisipasi perempuan dalam partai politik menjadi menarik mengingat budaya Madura pada umumnya terkenal sebagai masyarakat yang patriarkis dan religius. Norma-norma agama (islam) bagi masyarakat Madura selalu dijadikan acuan dan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam partai politik. Serta adanya anggapan masyarakat Madura bahwa perempuan itu orang kedua setelah laki-laki, perempuan dilarang terlalu ikut campur dalam hal mengeluarkan aspirasi pemikirannya, pendapatnya, dan dalam hal memimpin (*norok bhunthe'*) istilah Madura, Karena itu banyak masyarakat berpikir perempuan yang menggeluti bidang politik dianggap sebagai hal yang tabu, adanya kesan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki.

Apabila dilihat dari sudut pandang keadilan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dalam kehidupan yang mereka jalani, maka keadaan marjinal tampak jelas dalam keadaan ini. Diskriminasi yang dimaksud tampak jelas pada sektor publik sebenarnya, partisipasi perempuan dalam partai politik PDI-P di kantor DPC Kabupaten Bangkalan sudah cukup memadai karena sudah melibatkan kepengurusan perempuan. Jika dibandingkan dengan kepengurusan pada tahun 2009-2014 maka keterlibatan atau partisipasi perempuan sangat minim dan dari beberapa kepengurusan hanya dua perempuan yang terlibat dalam kepengurusannya (data pada struktur kepengurusan tahun 2009). Dalam hal kepengurusan yang sekarang ini, meski sudah melibatkan beberapa perempuan tetapi kekuasaan dan hal lain sebagainya masih didominasi oleh laki-laki di buktikan dengan adanya

pembentukan struktur kepengurusan di DPC partai PDI-P Bangkalan, bahwa masih didominasi oleh kaum laki-laki, beberapa perempuan saja yang masuk dalam struktur kepengurusannya.

Mengambil kaidah dari penelitian sebelumnya, peneliti mengambil dari sisi yang melatar belakang, pada penelitiannya menjelaskan seiring perkembangan zaman keterlibatan politisi perempuan di Madura mulai bergeser, terbukti dengan mulai adanya perempuan-perempuan yang terjun langsung dalam partai politik dan pemerintahan, hal ini di buktikan dengan ia meneliti sosok perempuan Madura yang terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Sumenep.

Peneliti memilih Partai Politik PDI-P sebagai bahasan proposal ini karena Partai PDI-P adalah salah satu partai politik yang dipimpin oleh sosok perempuan yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 5 yaitu Megawati Soekarno Putri, dan anak dari Megawati Soekarno Putri yaitu Puan Maharani juga menjabat sebagai menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan. Berdasarkan observasi awal pada kantor DPC Partai PDI-P Kabupaten Bangkalan. Partisipasi perempuan dalam partai politik ini, sangat meningkat dan efektif dengan seiring perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta gerakan-gerakan emansipasi wanita, peran dan khususnya pandangan mereka tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran.

Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya. Tetapi mereka juga sudah mulai aktif berperan di berbagai bidang salah satunya adalah bidang politik, mereka mulai ikut andil dan berpartisipasi dalam partai politik PDI-P ini. Hal-hal inilah yang melatar belakang peneliti, penelitian ini dianggap mempunyai keunikan tersendiri, kemudian penelitian ini penting kiranya diketahui masyarakat khususnya peneliti sendiri dengan perkembangan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai penjelasan yang telah di paparkan di atas sebagai tolak ukur dari penelitian ini dan juga berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menggali informasi tentang :

Bagaimana partisipasi perempuan dalam partai politik di DPC Partai PDI-P Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam partai politik di DPC Partai PDI-P Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah penelitian yang baik bagi mahasiswa mengenai partisipasi perempuan dalam partai politik dan selain itu sebagai bandingan bagi penelitian berikutnya yang sejenis
- b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambahkan kajian keilmuan, pengetahuan, dan wawasan serta dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengetai gambaran tentang partisipasi perempuan dalam partai politik.
- c. Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam penelitian yang berguna pada peningkatan partisipasi perempuan di dalam masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pemahaman mengenai partisipasi perempuan dalam partai politik. Sehingga di harapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap gender dalam dunia politik lagi.
- b. Memberi gambaran tentang partisipasi perempuan dalam partai politik PDI-P di Kabupaten Bangkalan
- c. Sebagai salah satu bentuk partisipasi perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Trunojoyo Madura untuk ikut andil bagian memecahkan problem sosial yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat.